

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN, IP  
M DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN

DI INDONESIA

A PADA TAH

UN 2017-202

2



oleh

Nama

: Ahmad Sirajuddin Al Ayyubi

Nomor Mahasiswa : 19313032

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025/2026

## HALAMAN JUDUL

# PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2022

## SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ahmad Sirajuddin Al Ayyu

bi

Nomor Mahasiswa : 19313032

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2024/2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, ..... 2025

Penulis,



Ahmad Sirajuddin Al Ayyubi

**PENGESAHAN**

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PADA  
TAHUN 2017-2022**

Nama : Ahmad Sirajuddin Al Ayyubi

Nomor Mahasiswa : 19313032

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'S' followed by a capital 'H' and a capital 'A' that are connected together. The signature is written in a cursive, flowing style.

Suharto SE.,M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN, IPM DAN PDRB TERHADAP  
KEMISKINAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2022**

Disusun oleh : AHMAD SIRAJUDDIN AL AYYUBI

Nomor Mahasiswa : 19313032

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 03 Maret 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Dra. Ari Rudatin, M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian yang berjudul **PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2022**. Yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMP, PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI terhadap kemiskinan di Indonesia.

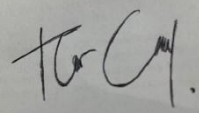
Dalam penelitian skripsi ini dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Suharto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
2. Ibu Dra. Ari Rudatin, M.Si. selaku dosen penguji yang juga telah menyediakan waktu, tenaga dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Universitas Islam Indonesia yang memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami.
4. Kedua Orang Tua, Kakek dan Nenek, serta Adik yang selalu memberikan doa dan perhatian dalam proses pembelajaran ini.
5. Teman-teman saya, SAPMA PP UII terimakasih atas segala hal baik yang terjadi selama proses perkuliahan.
6. Serta kepada semua yang sudah berkontribusi namun secara tidak sengaja tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menerima apabila ada saran dan kritikan yang diberikan oleh pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan terutama mahasiswa, dosen, dan pemerintah dalam melihat Ekonomi Makro di Indonesia yang jarang diperhatikan.

Yogyakarta, 2025

Penulis,

A rectangular photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'TG CM'.

Ahmad Sirajuddin Al Ayyubi

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| JUDUL                        | i   |
| HALAMAN JUDUL                | ii  |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| PENGESAHAN                   | iv  |
| KATA PENGANTAR               | v   |
| DAFTAR ISI                   | vii |
| DAFTAR TABEL                 | xi  |
| DAFTAR GAMBAR                | xii |
| ABSTRAK                      | 1   |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       | <b>2</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah                                     | 2         |
| 1.2 Rumusan Masalah                                            | 11        |
| 1.3 Tujuan Penelitian                                          | 12        |
| 1.4 Manfaat Penelitian                                         | 12        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>                | <b>14</b> |
| 2.1 Kajian Pustaka                                             | 14        |
| 2.1.1 Penelitian Terdahulu                                     | 14        |
| 2.2 Landasan Teori                                             | 19        |
| 2.2.1 Upah Minimum Provinsi                                    | 19        |
| 2.2.2 Tingkat Pengangguran                                     | 20        |
| 2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                         | 20        |
| 2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi                                      | 22        |
| 2.2.5 Kemiskinan                                               | 23        |
| 2.3 Kerangka Penelitian                                        | 24        |
| 2.4 Hipotesis Penelitian                                       | 24        |
| 2.4.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan | 24        |
| 2.4.2 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan                | 25        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan | 26        |
| 2.4.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan              | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                    | <b>28</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian                                                | 28        |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data                                           | 28        |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data                                         | 28        |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel                                   | 28        |
| 3.4.1 Upah Minimum Provinsi                                         | 28        |
| 3.4.2 Pengangguran                                                  | 29        |
| 3.4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                              | 29        |
| 3.4.4 Pertumbuhan Ekonomi                                           | 29        |
| 3.4.5 Kemiskinan                                                    | 30        |
| 3.5 Metode Analisis                                                 | 30        |
| 3.6 Estimasi Regresi Data Panel                                     | 30        |
| 3.6.1 Common Effect Model (CEM)                                     | 31        |
| 3.6.2 Fixed Effect Model (FEM)                                      | 31        |
| 3.6.3 Random Effect Model (REM)                                     | 31        |
| 3.7 Pemilihan Model Yang Tepat                                      | 31        |
| 3.7.1 Uji Chow (Chow Test)                                          | 32        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.7.2 Uji Hausman (Hausman Test)                | 32        |
| 3.8 Pengujian Hipotesis                         | 33        |
| 3.8.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )           | 33        |
| 3.8.2 Uji Simultan (Uji F)                      | 33        |
| 3.8.3 Uji Parsial (Uji t)                       | 34        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>              | <b>35</b> |
| 4.1 Hasil                                       | 35        |
| 4.1.1 Deskriptif Data Penelitian                | 35        |
| 4.2 Estimasi Regresi Data Panel                 | 38        |
| 4.3 Pemilihan Model                             | 39        |
| 4.3.1 Uji Chow                                  | 39        |
| 4.3.2 Uji Hausman                               | 40        |
| 4.3.3 Uji Lagrange Multiplier                   | 41        |
| 4.4 Hasil Regresi Panel (CEM)                   | 43        |
| 4.5 Pembahasan                                  | 45        |
| 4.5.1 Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan | 45        |

|       |                                           |           |
|-------|-------------------------------------------|-----------|
| 4.5.2 | Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan | 46        |
| 4.5.3 | Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan          | 47        |
| 4.5.4 | Pengaruh Pertumbuhan 73                   |           |
|       | <b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b>     | <b>49</b> |
| 5.1   | Simpulan                                  | 49        |
| 5.2   | Implikasi                                 | 50        |
|       | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                     | <b>52</b> |
|       | <b>LAMPIRAN</b>                           | <b>56</b> |
|       | Lampiran I. Data Penelitian               | 56        |
|       | Lampiran II. Hasil Regresi                | 63        |
|       | Lampiran III. Deskriptif Data Penelitian  | 63        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan upah minimum di Indonesia tahun 2017-2022 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 16 |
|---------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 4. 1 Deskriptif Data Penelitian | 36 |
| Tabel 4. 2 Hasil Regresi              | 39 |
| Tabel 4. 3 Uji Chow                   | 40 |
| Tabel 4. 4 Uji Hausman                | 41 |
| Tabel 4. 5 Uji LM Breusch-Pagan       | 42 |
| Tabel 4. 6 Uji Regresi Panel CEM      | 43 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Upah Minimum Provinsi di Indonesia (Juta)        | 5  |
| Gambar 1. 2 Pengangguran di Indonesia (Persen)               | 6  |
| Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan manusia di Indonesia (Persen) | 8  |
| Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi                              | 9  |
| <br>                                                         |    |
| Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian                              | 24 |

## **ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dalam perekonomian suatu negara, penyebab serta dampak dari kemiskinan berasal dari berbagai faktor namun utamanya kemiskinan disebabkan oleh tingginya upah minimum provinsi, pengangguran, IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2022. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier, dan uji regresi panel. Hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan untuk membuat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, IPM, Pertumbuhan Ekonomi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan di negara-negara berkembang dianggap sebagai permasalahan yang sangat kompleks, dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas kebijakan utama di banyak negara berkembang. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup dasar tertentu yang sepadan dengan bakat dan sumber daya yang dimiliki. Penilaian kemiskinan berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai situasi kesejahteraan suatu negara (Wang et al., 2020). Menurut (Marini, 2016), pembangunan adalah upaya internal untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat.

akat terutama melalui pembangunan ekonomi. Hal inilah yang terjadi saat ini, permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius, jumlahnya cenderung meningkat, dan dapat berdampak pada berbagai aspek (Pratama, 2014).

Pemberantasan kemiskinan akan mendapat prioritas yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Saat ini, terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat dan menurun setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan oleh berkembangnya kebijakan yang efektif, khususnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberian perlindungan sosial yang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap pelayanan publik, dan kemungkinan terjadinya penghidupan yang layak (Sulistiawan, 2012). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, tantangan besar masih ada dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat (Mubyarto, 2004)

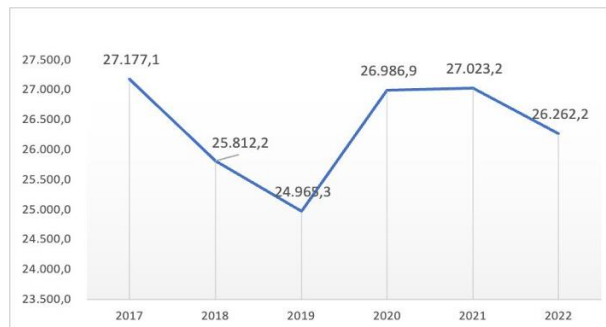
Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan upaya berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia (Oktaviana et al., 2021).

Kemiskinan juga masih menjadi persoalan di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2018 sebanyak 10,13 juta dan pada tahun 2019 sebanyak 9,86 juta. Penyebab kemiskinan di perkotaan meliputi migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan tanpa keterampilan yang memadai, sehingga mereka menghadapi pengangguran atau pendapatan rendah. Selain itu, kurangnya modal dan pendidikan yang rendah juga berperan dalam kemiskinan perkotaan.

Data ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan penelitian dan upaya yang lebih lanjut dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Indeks keparahan kemiskinan adalah sebuah ukuran yang menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi juga ketimpangan dalam pengeluaran di antara mereka. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan adalah nilai rata-rata kesenjangan p

pengeluaran per individu miskin terhadap garis kemiskinan. Di Indonesia, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun tingkat keparahan kemiskinan tetap tinggi. Demikian pula, angka kedalaman kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun, namun tingkat kedalaman kemiskinan tetap tinggi.

Pada pengukuran kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Ukuran garis kemiskinan pada tahun 2017 sebesar Rp 345.066/perkapita/perbulan dan tahun 2022 sebesar Rp 535.547/perkapita/perbulan. Garis kemiskinan menunjukkan terjadi peningkatan sehingga mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data garis kemiskinan dapat menghitung jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia:



**Grafik 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2022 (ribu jiwa**

**)**

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di negara ini masih relatif tinggi. Pada tahun 2017 dan 2021, jumlah penduduk miskin tertinggi selama 2017-2022 mencapai lebih dari 27 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 hingga 2019 yang mengalami penurunan dari 27.177,1 ribu jiwa menjadi 24.968,3 ribu jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak hingga tahun 2021.

Kondisi diatas diperlukan upaya dari pemerintah untuk mengambil kebijakan guna menekan angka kemiskinan di Indonesia. Upaya yang dilakukan dapat mempertimbangan berdasarkan teori dan jurnal yang ada. Salah satunya berdasarkan teori kemiskinan dari Todaro dan Smith (2006) dan Sardon Sukirno (2000) yang menjelaskan penyebab kemiskinan, sehingga dengan penyebabnya tersebut dapat ditekan atau dicegah sehingga kemiskinan akan menurun.

Penyebab kemiskinan diantaranya menurut Todaro dan Smith, kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh rendahnya pendapatan nasional dan per kapita, distribusi pendapatan yang tidak merata, buruknya kondisi sosial dan kesehatan, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya akses terhadap modal untuk investasi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana rendahnya pendapatan menghambat tabungan, investasi, dan produktivitas masyarakat. (Todaro dan Smith, 2006)

Selain diatas penyebab kemiskinan yaitu kemiskinan merupakan efek dari menurunnya kemakmuran yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang bersumber dari tingginya tingkat pengangguran di suatu daerah

ah.(Sukirno, 2000)Terdapat penelitian yang menyatakan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum memiliki hubungan yang kompleks dengan kemiskinan di Indonesia. (Nasir, 2008)

Secara keseluruhan, berdasarkan teori dan jurnal upaya yang dilakukan dalam penurunan kemiskinan dengan pendekatan yang holistik yang melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang terkoordinasi untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan dan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang dilakukan akan dapat tercermin jika berhasil dengan menunjukkan peningkatan UMP, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi maka terjadi penurunan pengangguran. Berikut Data yang menunjukkan Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2022:

**Tabel 1.1** Data Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2022

| Tahun | UMP (rupiah) | Pengangguran (%) | IPM(%) | Pertumbuhan Ekonomi(%) |
|-------|--------------|------------------|--------|------------------------|
|       |              |                  |        |                        |

|      |           |      |       |       |
|------|-----------|------|-------|-------|
| 2017 | 2.074.685 | 5,5  | 70,81 | 5,07  |
| 2018 | 2.268.874 | 5,3  | 71,39 | 5,17  |
| 2019 | 2.455.662 | 5,23 | 71,92 | 5,02  |
| 2020 | 2.672.371 | 7,07 | 71,94 | -2,07 |
| 2021 | 2.687.724 | 6,49 | 72,29 | 3,07  |
| 2022 | 2.729.463 | 5,86 | 72,91 | 5,31  |

Sumber: *UMK*, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 Upah minimum merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan karena upah minimum menentukan besarnya penghasilan yang diterima oleh pekerja. Jika upah minimum rendah, maka pendapatan pekerja juga akan rendah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu, tingkat kenaikan upah minimum tidak selalu sejalan dengan inflasi dan biaya hidup yang semakin meningkat di suatu daerah atau negara. Hal ini bisa berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun dan akhirnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Selain itu, kesenjangan antara upah minimum dengan penghasilan para pejabat pemerintahan atau kalangan atas dalam sebuah negara dapat memperburuk situasi kemiskinan. Kesenjangan ini menyebabkan distribusi

pendapatan menjadi tidak merata dan menguntungkan kelompok tertentu saja.

Dasar penetapan upah minimum Kota/Kabupaten adalah tingkat upah minimum Provinsi, yang belum dapat menetapkan upah minimum di tingkat daerahnya sendiri. Selama lima tahun terakhir, upah minimum di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan peningkatan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada tahun 2017, upah minimum di Indonesia adalah Rp2.074.685, kemudian naik menjadi Rp2.268.874 pada tahun 2018, Rp2.455.662 pada tahun 2019, Rp2.672.371 pada tahun 2020, pada tahun 2021 upah minimum yaitu Rp2.672.371, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp2.729.463.. Meskipun terjadi kenaikan setiap tahunnya, tetap diatur bahwa nilai upah minimum harus berada di atas kebutuhan hidup layak masyarakat. Hal ini berarti bahwa kenaikan upah tidak akan memiliki arti jika nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetap berada di atas jumlah upah minimum.

Berdasarkan tabel 1.1 Pengangguran juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penentu kondisi masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pendap

atan yang tinggi, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka dan meningkatkan tingkat kemakmuran. Tingkat pendapatan masyarakat akan mencapai puncaknya ketika terjadi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Namun, jika pendapatan masyarakat rendah, hal ini akan menimbulkan masalah dan menjadi permasalahan dalam konteks kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan tren penurunan meskipun mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran mencapai 5,50%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,30% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan lebih lanjut menjadi 5,23%. Namun, pada tahun 2020, tingkat pengangguran mengalami kenaikan menjadi 7,07%, yang disebabkan adanya fenomena Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 6,49% dan pada tahun 2022 pun mengalami penurunan menjadi 5,86%. Meskipun kecenderungannya adalah penurunan, adanya masalah pengangguran perlu segera diatasi oleh pemerintah sebelum menjadi serius dan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Berdasarkan tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. IPM menjadi penting dalam kaitannya dengan kemiskinan karena mencakup beberapa komponen dasar yang memengaruhi kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (2009), IPM merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia yang didasarkan pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang mencerminkan empat komponen, yaitu harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata lama bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup yang layak.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia, yang dapat dinilai melalui indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, hal ini akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja penduduk, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan yang rendah. Akibatnya, ju

mlah penduduk miskin meningkat (Saputra, 2011). Berdasarkan data indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, IPM sebesar 70,81 dan meningkat menjadi 71,39 pada tahun 2018. Indeks pembangunan manusia terus meningkat dilihat pada tahun 2019 sebesar 71,92, pada tahun 2020 sebesar 71,94, pada tahun 2021 sebesar 72,29 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yang mencapai 72,91. Dengan peningkatan indeks pembangunan manusia ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.1 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tanpa adanya penambahan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan (*ceteris paribus*), sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan angka kemiskinan (Tambunan, 2003).

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan angka kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Siregar Dan Wahyuniarti (2007) menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik regional bruto (Pertumbuhan Ekonomi) berperan dalam mengurangi kemiskinan, khususnya di kawasan pedesaan yang menjadi lokasi utama kantong-kantong kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat dari nilai Pertumbuhan Ekonomi. Nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan tren kenaikan meskipun berfluktuasi dan tidak terlalu signifikan pada perkembangannya. Pada tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia sebesar 9.912.928,10 miliar rupiah, pada tahun 2018-2019 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10.425.851,90 dan 10.949.155,40 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 10.722.999,30 miliar rupiah, pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 11.120.077,90 miliar rupiah dan pada tahun 2022 pun mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 11.710.

397.80 miliar rupiah. Nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil yang cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi nilai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia masih belum berpengaruh untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Indonesia memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, pencapaian dalam pengurangan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh kualitas pertumbuhan tersebut serta kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Mendorong investasi dan memperkuat sektor-sektor yang berpengaruh pada pengurangan kemiskinan menjadi faktor kunci untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan di masa depan.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, hal itu dikarenakan Akibat pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh dunia, Indonesia menghadapi dampak langsung terhadap tingkat perekonomiannya. Pandemi ini menyebabkan banyak PHK terjadi, yang berdampak pada produktivitas dan daya beli, serta mengubah perekonomian secara signifikan. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan perlahan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya cepat dan tepat pemerintah

tah dalam menangani masalah pandemi covid-19. Akibatnya, perekonomian masyarakat mulai pulih seiring berkurangnya jumlah orang yang terinfeksi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan jika UMP, Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2022. Meskipun pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan, namun pemerintah dan masyarakat harus tetap saling bekerja sama untuk mengurangi tingkat kemiskinan tiap tahunnya untuk memakmurkan masyarakat. Maka permasalahan yang terbilang sangat serius ini harus dievaluasi untuk masa depan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2022. Hasil penelitian ini adalah variabel Upah Minimum, Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel pada saat yang bersamaan. Hal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap Kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pembahasan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang pengaruh upah minimum, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa manfaat yang dapat disebutkan, antara lain:

Penelitian ini memiliki manfaat yang beragam bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Bagi Peneliti/Akademisi:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi penelitian serupa di masa depan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi

ensi yang penting untuk pengembangan pengetahuan di bidang yang sam

a.

2. Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi tambahan referensi yang berharga dan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian-penelitian mendatang.

3. Bagi Pemerintah/Pengambil Keputusan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan kepada pemerintah Indonesia di setiap provinsi terkait dengan isu kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Penulisan skripsi ini bergantung pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber perbandingan, baik dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang telah ada, maupun sebagai landasan untuk merumuskan kerangka pemikiran atau arah penelitian ini. Penulis juga menggunakan referensi dari skripsi dan buku-buku sebagai sumber informasi dan landasan teori ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam skripsi ini, penulis melakukan studi terhadap beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai perbandingan yang mencakup kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain itu, penulis juga mengumpulkan informasi dari buku-buku yang relevan untuk mendapatkan dasar teori ilmiah terkait dengan judul penelitian "Pengaruh upah minimum provinsi, pengang

guran, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia".

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2017) menjelaskan bahwa pengangguran dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode tersebut. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012) menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran, inflasi, dan pendidikan, dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, inflasi berpengaruh negatif dan pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (Amalia, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Sebayang (2013) menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik, dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi dan belanja publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Sebayang, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap

jumlah penduduk miskin, sementara UMK berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (Ayu, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh berbagai variabel terhadap tingkat kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk, dengan kemiskinan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2008-2012 (Puspita, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum dan Ayu, Amalia Sebayang, Puspita telah digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini karena mengacu pada variabel yang sama, seperti variabel dependen kemiskinan dan variabel independen upah minimum, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan sumber data yang sama, yaitu data sekunder. Oleh karena itu, berdasarkan kesamaan tersebut, penelitian sebelumnya menjadi dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah perbedaan kawasan penelitian dan tahun penelitian.

## **2.2 Landasan Teori**

Pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Namun, secara umum, mari kita lihat bagaimana faktor-faktor ini dapat berinteraksi dalam konteks kemiskinan di negara tersebut.

### **2.2.1 Upah Minimum Provinsi**

Peningkatan upah mengakibatkan peningkatan penawaran tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi permintaan tenaga kerja. Dampaknya adalah terjadinya surplus tenaga kerja atau pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan kekakuan upah meliputi peraturan upah minimum, serikat pekerja, dan efisiensi upah (Mankiw, 2012). Tujuan penetapan upah minimum meliputi:

1. Mencegah dan mengurangi persaingan yang tidak sehat antara para pekerja.
2. Mencegah atau mengurangi eksploitasi pekerja oleh pengusaha.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Menciptakan hubungan yang lebih aman dan harmonis antara pekerja dan pengusaha.

### **2.2.2 Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyebabkan atau memperburuk kemiskinan di Indonesia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, kesempatan kerja menjadi langka, dan ba

nyak orang sulit untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, dan tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang layak sangat penting untuk mengurangi kemiskinan.

### **2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia suatu negara, termasuk faktor-faktor seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Tingkat IPM yang rendah sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jika IPM di Indonesia rendah, itu menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warganya. Investasi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi dapat membantu meningkatkan IPM dan pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan.

#### **2.2.3.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator – indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

1. Indeks Pendidikan (memiliki ilmu pengetahuan)
2. Indeks Kesehatan (memiliki umur yang panjang dan sehat).
3. Indeks Pengeluaran (standar kehidupan yang layak).

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai indikator yang dapat mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas manusia.
2. Dapat digunakan untuk mengukur peringkat atau tingkatan pembangunan di suatu wilayah.
3. IPM dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah.

#### **2.3.3.2 Keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru**

Dengan menggunakan ukuran yang lebih akurat dan memiliki kemampuan diskriminatif yang baik, beberapa perubahan pada paragraf tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam memasukkan data rata-rata lamanya sekolah dan angka harapan sekolah, akan menghasilkan deskripsi yang lebih relevan dalam konteks pendidikan dan perubahan yang terjadi.

2. Menggantikan PDB dengan PNB adalah pilihan yang tepat karena PNB mencerminkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah atau daerah.
3. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan rata-rata geometrik untuk memastikan bahwa pencapaian satu dimensi tidak dapat menggantikan pencapaian dimensi lainnya. Hal ini berarti untuk mencapai pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi dasar harus diperhatikan secara seimbang karena setiap dimensi memiliki kepentingannya sendiri.
4. Komponen-komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia antara lain:
  - a. Kesehatan dan umur, yang diukur dengan angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan yang mencerminkan keadaan kesehatan dan umur yang panjang.
  - b. Pendidikan, yang diukur dengan rata-rata lamanya sekolah untuk mencerminkan tingkat kecerdasan, kreativitas, keterampilan, dan moralitas manusia.
  - c. Pendapatan, yang diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat, untuk mengukur kemandirian manusia dan kualitas kehidupan yang layak.

5. Variabel dalam Indeks Pembangunan Manusia meliputi angka harapan hidup, pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dan rata-rata lamanya sekolah. Data angka harapan hidup dihitung menggunakan Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan daya beli menggunakan 96 komoditas, termasuk 66 komoditas makanan dan 34 komoditas non-makanan. Rata-rata lamanya sekolah mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin lama rata-rata waktu yang ditempuh untuk menempai jenjang pendidikan tersebut, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan kualitas manusia yang tinggi baik dalam cara berpikir maupun tindakan.

#### **2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan menjadi syarat penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana perkembangan perekonomian yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Peningkatan ini berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan

, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan di wilayah tersebut.

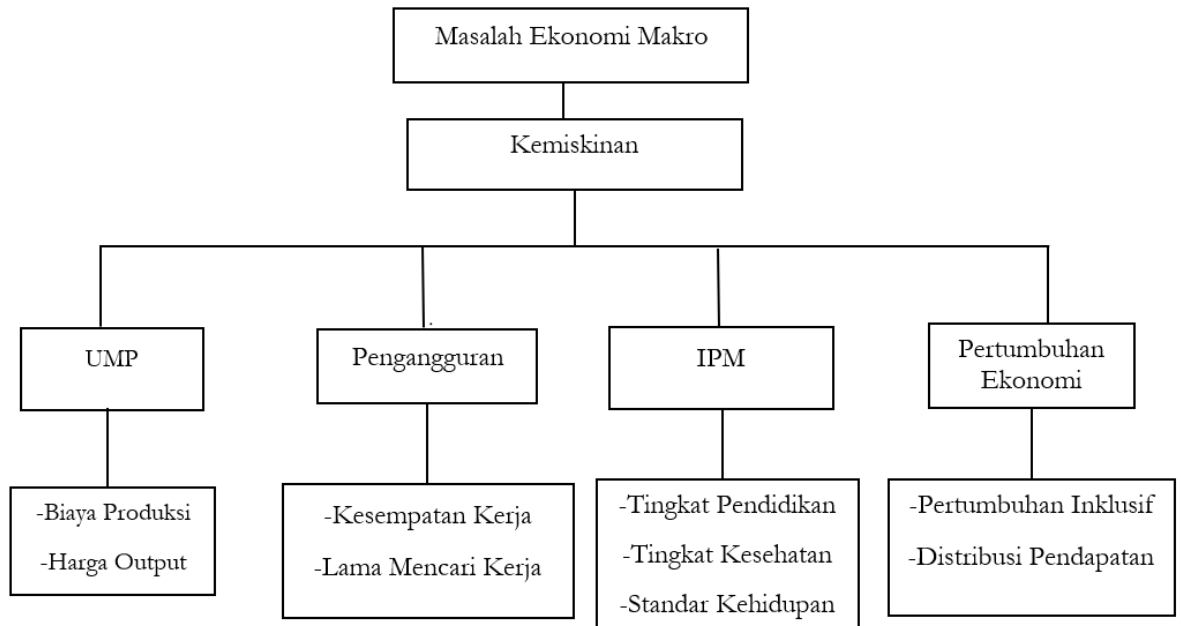
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis melalui berbagai teori dan pendekatan yang menjelaskan peran faktor-faktor tertentu dalam mendorong peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Teori-teori seperti **Teori Rostow**, **Harrod-Domar**, dan **pertumbuhan endogen** menekankan pentingnya investasi, akumulasi modal, dan inovasi sebagai elemen utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi juga merupakan proses yang memiliki dampak nyata pada kehidupan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan infrastruktur. Kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan investasi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan atau miskin.

### 2.2.5 Kemiskinan

Dalam rangka mengatasi kemiskinan di Indonesia, penting untuk menerapkan kebijakan yang holistik dan terkoordinasi. Langkah-langkah seperti pengelolaan utang yang bijaksana, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan investasi dalam pembangunan manusia dapat membantu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat yang kurang mampu.

## 2.3 Kerangka Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Pada landasan teori yang ditemukan diatas menghasilkan hipotesis s  
ebagai berikut:

#### **2.4.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan**

Penelitian dari (Oktaviana et al., 2021), hubungan antara upah minimum serta kemiskinan di Indonesia mengaitkan faktor-faktor yang lingkungan serta membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Upah minimum ialah standar pendapatan yang diatur oleh pemerintah buat melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Dalam beberapa keadaan kenaikan upah minimum bisa berfungsi dalam kurangi tingkatan kemiskinan dengan tingkatkan pemasukan pekerja. Bila peningkatan upah minimum dicoba secara adil serta diiringi dengan kebijakan yang pas perihal ini bisa memberikan peluang yang lebih baik untuk pekerja buat penuhi kebutuhan pokok semacam santapan perumahan, serta pendidikan. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikembangkan hipotesis awal selaku berikut:

H1: Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

#### **2.4.2 Hubungan Pengangguran terhadap kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Supit et al., 2023), terdapat hubungan erat antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, hal ini dapat menyebabkan pe

nurunan pendapatan dan kesulitan ekonomi bagi individu dan keluarga, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat kemiskinan.

Dalam situasi pengangguran, individu kehilangan sumber pendapatan utama dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, pengangguran yang berlangsung lama dapat menyebabkan kemiskinan kronis yang sulit untuk diatasi.

Selain itu, pengangguran juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Pengalaman pengangguran yang berkepanjangan dapat mengurangi keterampilan, pengalaman, dan kepercayaan diri seseorang, sehingga menghambat mobilitas sosial dan meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Diduga Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan

### 2.4.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan

Penelitian dari (Permana & Pasaribu, 2023) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan di Indonesia. IPM digunakan sebagai ukuran untuk mengestimasi kemajuan manusia di suatu wilayah atau negara dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Secara umum, tingkat IPM yang tinggi mencerminkan peningkatan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan di suatu wilayah atau negara. Ketika IPM meningkat, ini seringkali berarti adanya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks ini, peningkatan IPM dapat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kesehatan yang lebih baik dapat mengurangi risiko kemiskinan yang disebabkan oleh biaya pengobatan yang tinggi. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan peluang ekonomi. Peningkatan pendapatan juga memberikan kesempatan bagi individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan

utuhan dasar mereka. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

#### **2.4.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian oleh (Rahman Suleman & Hasibuan, 2021) mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) dan kemiskinan di Indonesia adalah kompleks. Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia menjadi topik penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, di mana penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Setiap peningkatan 1% dalam pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan hingga 0,196%, sebagaimana diungkapkan oleh Siregar Dan Wahyuniarti (2007) serta (Didu & Fauzi, 2016). Sek

tor-sektor strategis, seperti pertambangan dan industri, berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meskipun dampaknya bisa berbeda antar sektor. Namun, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor krusial karena pertumbuhan yang inklusif, di mana manfaatnya merata, lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah juga memegang peranan penting melalui kebijakan investasi publik, program sosial, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif pada kelompok masyarakat miskin. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan, sehingga upaya pemulihan pasca-pandemi harus fokus pada kelompok yang paling terdampak. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, tetapi hal ini sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan, kebijakan pemerintah, dan inklusi sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

H4: Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dari penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan data antara data cross-sectional atau data pada suatu titik waktu tertentu yang disandingkan dengan data time-series atau data runtun waktu. Dalam metode kuantitatif, data panel juga disebut sebagai data pooling. Laporan pelaksanaan tingkat Kemiskinan memberikan informasi realisasi Upah Minimum, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Kemiskinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data time-series dengan periode 2017-2022 dan data cross-section yang mencakup 33 provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel dependen yang dianalisis adalah tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis data panel dengan alat pengolah data Eviews 9. Statistik deskriptif yang disajikan mencakup nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan yaitu tahun 2017-2022 di Indonesia.

### **3.4 .Definisi Operasional Variabel**

Variabel dan definisi operasional yang digunakan kali ini adalah sebagai berikut:

### **3.4.1 Upah Minimum Provinsi**

Upah minimum provinsi adalah jumlah upah minimum yang berlaku di tingkat daerah provinsi dan diterima oleh pekerja setiap bulan. Upah minimum yang berlaku bervariasi di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 dan diukur dalam mata uang rupiah.

### **3.4.2 Pengangguran**

Tingkat pengangguran adalah persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Tingkat pengangguran diukur dalam persentase.

### **3.4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai indikator kualitas hidup, IPM terdiri dari tiga dimensi utama. Dimensi tersebut mencakup harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pengetahuan,

dan standar kehidupan yang layak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dalam metode baru untuk Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022, diukur dalam persentase.

#### **3.4.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi dalam persentase berdasarkan harga konstan di Indonesia selama periode 2017-2022. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh dinamika ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Tingkat pertumbuhan ekonomi diukur dalam persentase.

### 3.4.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, termasuk kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan lainnya. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022, yang diukur dalam jumlah individu (Ribuan jiwa) yang terkena dampak kemiskinan.

### 3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan EViews 10 untuk analisis data, variabel dependennya adalah Kemiskinan (Y), variabel independennya adalah Upah Minimum Provinsi (X1), Pengangguran (X2), IPM (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X4). Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dapat dirumuskan dengan menggunakan model berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan (Ribuan jiwa)

X1 = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

X2 = Pengangguran (Persen)

X3 = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

X4 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

$\beta_0$  = Konstanta (intersep)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

i = Provinsi ke-i

t = Tahun ke-t

### 3.6 Estimasi Regresi Data Panel

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widarjono pada tahun 2007, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi pada data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

#### 3.6.1 Common Effect Model (CEM)

Metode CEM merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam mengestimasi data panel, karena dalam model ini hanya men

gabungkan data time-series dan data cross-sectional tanpa memperhatikan time lag. Namun, metode CEM tidak memperhitungkan perbedaan individual dan perbedaan waktu, karena mengasumsikan bahwa keduanya memiliki peran yang sama.

### **3.6.2 Fixed Effect Model (FEM)**

Metode FEM merupakan teknik pemrosesan data di mana titik perpotongan dari setiap objek diekstraksi dengan asumsi kemiringan tetap. Pada metode ini, diperlukan variabel tambahan seperti variabel fiktif untuk menangkap perbedaan antara objek data pada periode waktu tertentu. Metode FEM efektif dalam mengidentifikasi perilaku data tertentu. Namun, kelemahan dari metode ini adalah terbatasnya derajat kebebasan yang mengurangi efisiensi parameter.

### **3.6.3 Random Effect Model (REM)**

Dalam mengatasi kelemahan metode FEM, metode REM digunakan dengan menambahkan variabel pengganggu atau error term. Variabel pengganggu ini memungkinkan adanya hubungan antar objek untuk mengatasi heteroskedastisitas.

### **3.7 Pemilihan Model Yang Tepat**

Dalam memilih model yang paling tepat untuk pengujian, statistik harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk memilih model yang paling sesuai. Beberapa tes berikut dapat dilakukan untuk menentukan model yang paling cocok:

#### **3.7.1 Uji Chow (Chow Test)**

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang lebih cocok. Sebelum melakukan pengujian, hipotesis berikut harus ditetapkan:

H0: Model Common Effect yang lebih cocok.

H1: Model Fixed Effect yang lebih cocok.

Dalam uji Chow, perbandingan antara statistik F dan nilai kritis F digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis. Jika nilai statistik F lebih besar dari nilai kritis F, maka hipotesis H0 diterima, yang berarti model Common Effect lebih cocok. Sebaliknya, jika nilai statis

titik  $F$  lebih kecil dari nilai kritis  $F$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak, dan model Fixed Effect lebih cocok.

### 3.7.2 Uji Hausman (Hausman Test)

Setelah melakukan uji Chow sebelumnya, dilakukan uji Hausman untuk menentukan model yang lebih cocok antara Fixed Effect atau Random Effect. Jika hasil uji Chow sebelumnya memilih model Common Effect sebagai yang paling cocok, maka uji Hausman tidak perlu dilakukan ulang. Namun, jika hasil uji Chow memilih model Fixed Effect sebagai yang paling cocok, maka uji Hausman perlu dilakukan. Dalam memilih model yang paling tepat antara Fixed Effect dan Common Effect, peneliti menggunakan uji Hausman dengan hipotesis berikut:

$H_0$ : Model Random Effect yang lebih cocok digunakan.

$H_1$ : Model Fixed Effect yang lebih cocok digunakan.

Penggunaan model Fixed Effect dianggap lebih cocok jika gagal menerima  $H_0$ , yaitu ketika statistik uji Hausman lebih besar dari nilai kritis. Namun, model Random Effect dianggap lebih baik jika me

nerima  $H_0$ , yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis.

### **3.8 Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini, digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji regresi gabungan (Uji F), dan uji koefisien regresi parsial (Uji t) sebagai uji hipotesis.

#### **3.8.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel yang termasuk dalam studi. Rentang nilai koefisien determinasi ini adalah antara 0 hingga 1. Variabel independen dianggap lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen jika nilai  $R^2$  lebih besar atau mendekati 1. Sebaliknya, jika nilai  $R^2$  kecil atau mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik.

### 3.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji secara statistik apakah semua variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis pada uji F adalah:

H0: Koefisien semua variabel independen adalah 0.

H1: Setidaknya satu koefisien variabel independen bukan 0.

Jika nilai probabilitas F-hitung kurang dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai probabilitas F-hitung lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 gagal diterima, yang berarti semua variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.8.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t parsial digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas t-hitung (p-value) dari uji t parsial kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal

ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas  $t$ -hitung lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak ditolak, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak, dan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1.1 Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang menggabungkan data cross-sectional dan time-series Indonesia selama periode 2017 hingga 2022, yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia dengan beberapa variabel seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 4. 1** Deskriptif Data Penelitian

| Variabel   | <i>Mean</i> | <i>Median</i> | <i>Maximum</i> | <i>Minimum</i> | Std. Dev. |
|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Kemiskinan | 742,664     | 329,440       | 4.580.290      | 12.060         | 1.090.889 |

|                                       |           |           |           |           |        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| UMP                                   | 2.478.289 | 2.462.576 | 4.641.854 | 1.337.645 | 564020 |
| Pengangguran                          | 5,059     | 4,6       | 10,950    | 1,4       | 1,732  |
| IPM                                   | 70,925    | 71,2      | 81,7      | 59,1      | 3,948  |
| Pertumbuhan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi | 2,780     | -1,335    | 41,170    | -4,510    | 10,909 |

Sumber : Olah Data Eviews 12

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, variabel-variabel dalam penelitian ini menunjukkan variasi yang cukup besar. Rata-rata jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi Indonesia selama periode 2017-2022 tercatat sekitar 742 ribu orang, dengan nilai tengah (*median*) sebesar 329 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tertinggi ditemukan mencapai 4,58 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terendah sebesar 12 ribu orang. Simpanan baku variabel ini cukup tinggi, yaitu sekitar 1,09 juta, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar provinsi di Indonesia terkait tingkat kemiskinan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia selama periode tersebut memiliki rata-rata sebesar 2,48 juta rupiah, dengan median 2,46 juta rupiah. UMP tertinggi tercatat sebesar 4,64 juta rupiah, sementara yang terendah sebesar 1,34 juta rupiah. Dengan simpangan baku sebesar 564 ribu rupiah, data ini mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan upah minimum yang cukup signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia, tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi dan biaya hidup di setiap wilayah.

Pada variabel pengangguran, rata-rata persentase tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,06%, dengan nilai tengah (*median*) sebesar 4,6%. Persentase tertinggi ditemukan mencapai 10,95%, sementara persentase terendah adalah 1,4%. Simpangan baku sebesar 1,73% menunjukkan adanya variasi yang relatif moderat antar provinsi. Angka ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat perbedaan tingkat pengangguran di setiap wilayah, secara umum data menunjukkan distribusi yang tidak terlalu ekstrem.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 70,9 dengan nilai tengah 71,2. Nilai tertinggi IPM tercatat di angka 81,7, sementara nilai terendah berada di angka 59,1. Simpangan baku sebesar 3,95 menunjukkan distribusi IPM yang

relatif seragam, meskipun terdapat beberapa provinsi dengan nilai IPM yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan rata-rata.

Pada variabel Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dalam persentase, rata-rata pertumbuhan tercatat sebesar 2,78% dengan nilai median sebesar -1,33%. Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi mencapai 41,17%, sementara nilai terendah adalah -4,51%. Simpangan baku sebesar 10,91% menunjukkan adanya variasi yang sangat besar antarprovinsi, mengindikasikan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di berbagai wilayah selama periode penelitian. Nilai negatif mencerminkan adanya kontraksi ekonomi di beberapa provinsi, sementara nilai positif menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis deskriptif ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara provinsi-provinsi di Indonesia dalam hal tingkat kemiskinan, UMP, pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi yang memberikan gambaran penting untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai wilayah.

#### 4.1 Estimasi Regresi Data Panel

Bagian ini membahas hasil analisis estimasi regresi data panel yang dilakukan untuk menguji hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel independen, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi). Analisis ini menggunakan data panel yang menggabungkan dimensi *cross-sectional* dan *time-series* untuk provinsi-provinsi di Indonesia pada periode 2017-2022.

Pendekatan regresi data panel memberikan keunggulan dalam mengendalikan heterogenitas antarwilayah dan mengidentifikasi pengaruh-pengaruh variabel yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam bagian ini, tiga model regresi data panel utama akan dianalisis adalah model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Ketiga model ini akan dibandingkan untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan data melalui serangkaian uji model, seperti uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Proses estimasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman m

endalam mengenai hubungan dinamis antara variabel-variabel yang diteliti dan menemukan model yang paling cocok untuk menjelaskan pola hubungan tersebut dalam konteks ekonomi Indonesia.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil estimasi regresi untuk tiga model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Model Common Effect* (CEM), *Model Fixed Effect* (FEM) dan *Model Random Effect* (REM). Koefisien untuk masing-masing model serta uji t dan nilai probabilitas disajikan untuk keempat variabel.

**Tabel 4.2** Hasil Perbandingan Regresi 3 Model

|                                      |           | CEM          | FEM          | REM        |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| C                                    | Koefisien | 2.639.882,15 | 2.205.107,02 | -875.770,1 |
| UMP (X1)                             | t (prob)  | 0,000        | 0,069        | 0,088      |
|                                      | Koefisien | -0,365       | 0,0370       | -0,208     |
| Pengangguran (X2)                    | t (prob)  | 0,000        | 0,493        | 0,000      |
|                                      | Koefisien | 64.591,35    | 12196,14     | 33544,59   |
| IPM (X3)                             | t (prob)  | 0,005        | 0,128        | 0,000      |
|                                      | Koefisien | -21.648,03   | -22.911,55   | 27.222,57  |
| Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi (X4) | t (prob)  | 0,025        | 0,215        | 0,000      |
|                                      | Koefisien | 78.478,99    | 3.218,83     | 12.285,47  |
| R-Squared                            |           | 0,000        | 0,003        | 0,000      |
| F-Statistics                         |           | 0,783        | 0,995        | 0,175      |

Sumber : Olah Data Eviews 12

## 4.2 Uji Pemilihan Model

Pengujian alat diperlukan untuk menentukan model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* mana yang terbaik. Ada tiga alat pengujian yang digunakan, yaitu:

### 4.2.1 Uji Chow

Untuk menentukan model mana yang lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM), digunakan Uji Rasio Kemungkinan atau *Chow Effect Test*. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Common Effect* atau sebaliknya. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Model* lebih sesuai daripada *Fixed Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model* lebih sesuai daripada *Common Effect Model*

Tabel 4.3 Uji Chow

| <i>Effect Test</i> | <i>Statistic</i> | d.f. | Prob. |
|--------------------|------------------|------|-------|
|--------------------|------------------|------|-------|

|                                 |            |              |           |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|
| <i>Cross-section F</i>          | 22,59<br>1 | (33,16<br>6) | 0,00<br>0 |
| <i>Cross-section Chi-square</i> | 41,87<br>0 | 33           | 0,06<br>7 |

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dalam uji *Chow Effect Test*, digunakan probabilitas *Cross-section F-Statistic* untuk menentukan apakah  $H_0$  dapat diterima atau ditolak. Jika probabilitas lebih kecil dari ( $\alpha=0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Hasil uji Chow menunjukkan statistik *Cross-section F* sebesar 22,591 dengan nilai probabilitas 0,000, yang lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ .

Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti *Fixed Effect Model* lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model* untuk penelitian ini. Selain itu, statistik *Cross-section Chi-square* sebesar 41,870287 dengan probabilitas 0,067, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa berdasarkan uji Chi-square, tidak ada bukti kuat untuk mendukung *Fixed Effect Model*. Namun, melihat hasil F-statistik yang lebih kuat dan signifikan, kita tetap memilih *Fixed Effect Model* sebagai model yang lebih sesuai.

. Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji Chow, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih sesuai digunakan dalam analisis ini.

#### 4.2.2 Uji Hausman

Setelah melakukan Uji Chow dan menentukan model yang lebih tepat, selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Uji Hausman bertujuan untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : *Model Random Effect* lebih sesuai daripada *Model Fixed Effect*

H1 : *Model Fixed Effect* lebih sesuai daripada *Model Random Effect*

**Tabel 4.4** Uji Hausman

| <i>Hausman Test</i>         |              |              |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| <i>Test Summary</i>         | Chi-Sq. d.f. | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
| <i>Cross-section random</i> | 26,804       | 4            | 0,071 |

Sumber : Olah Data Eviews 12

Hasil dari Uji Hausman menunjukkan statistik *Chi-Square* sebesar 26,804 dengan derajat kebebasan (d.f.) sebanyak 4 dan nilai probabilitas sebesar 0,071. Karena nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha=0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa model *Random Effect* tidak dapat ditolak, sehingga *Random Effect* dianggap lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effect* untuk analisis ini, meskipun nilai probabilitasnya dekat dengan batas signifikansi. Dengan demikian, meskipun pada uji Chow ditemukan bahwa *Fixed Effect Model* lebih sesuai berdasarkan uji F, Uji Hausman menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat untuk diterapkan dalam analisis lebih lanjut.

#### 4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model yang lebih sesuai, selanjutnya dilakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan untuk membandingkan model *Common Effect Model* (CEM) dengan model *Random Effect Model* (REM). Uji LM ini bertujuan untuk menguji apakah model efek acak lebih baik digunakan dibandingkan dengan model efek umum. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

Setelah melakukan uji Chow dan uji Hausman, dilakukan pula Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang lebih tepat digunakan. Uji LM ini menguji signifikansi dari model efek acak dan efek tetap dalam kaitannya dengan data panel yang digunakan.

H0 : *Common Effect Model* lebih sesuai daripada *Random Effect Model*

H1 : *Random Effect Model* lebih sesuai daripada *Common Effect Model*

**Tabel 4.5 Uji LM Breusch-Pagan**

|               | <i>Cross Section</i> | <i>Test Hypothesis Time</i> | <i>Both</i> |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Breusch Pagan | 29,837               | 0,265                       | 29,863      |
|               | (0,870)              | (0,000)                     | (0,870)     |

Sumber : Olah Data Eviews 12

Hasil dari Uji LM Breusch-Pagan menunjukkan nilai statistik sebesar 29,837 untuk *Cross Section* dan 29,863 untuk *Time*. Probabilitas untuk *Cross Section* adalah 0,870, sementara untuk *Time* adalah 0,000. Nilai probabilit

as yang tinggi pada *Cross Section* (lebih besar dari  $\alpha=0,05$ ) menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk mendukung adanya efek acak pada data, sehingga mendukung hipotesis  $H_0$ . Sebaliknya, nilai probabilitas *Time* yang sangat kecil (kurang dari  $\alpha=0,05$ ) menunjukkan adanya signifikansi pada dimensi waktu, yang dapat mendukung penggunaan *Random Effect Model* dalam aspek temporal.

Namun, karena probabilitas untuk *cross section* (0,870) lebih besar dari 0,05, Uji LM Breusch-Pagan secara keseluruhan mendukung penerapan *Common Effect Model* (CEM). Data tidak menunjukkan adanya signifikansi cukup untuk menggunakan *Random Effect Model*, khususnya dalam dimensi antar unit (*cross section*).

Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji LM Breusch-Pagan, *Common Effect Model* (CEM) dianggap lebih sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat probabilitas yang tinggi pada dimensi *cross section* dan kurangnya bukti untuk mendukung *Random Effect Model* secara keseluruhan.

### 4.3 Hasil Regresi Panel (CEM)

Setelah menentukan model yang paling sesuai melalui serangkaian uji seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM Breusch-Pagan, *Common Effect Model* (CEM) dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk analisis data panel dalam penelitian ini. Model ini dianggap sesuai karena tidak adanya bukti yang mendukung keberadaan efek individu atau efek acak pada data penelitian.

Pada tahap ini, regresi panel menggunakan model CEM dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Model CEM mengasumsikan bahwa parameter regresi yang dihasilkan bersifat homogen antar unit observasi (provinsi) dan sepanjang periode waktu yang diteliti.

Tabel 4. 6 Uji Regresi Panel CEM

| <i>Common Effect Model</i>  |                 |                |                 |           |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| Variabel                    | Coefficien<br>t | Std. Erro<br>r | t-Statisti<br>c | Prob<br>. |
| C                           | 2.639.882       | 662.093,<br>9  | 3,987           | 0,00<br>0 |
| UMP (X1)                    | -0,366          | 0,073          | -5,000          | 0,00<br>0 |
| Pengangguran (X2)           | 64.591,35       | 23.023,7<br>0  | 2,805           | 0,00<br>5 |
| IPM (X3)                    | -21.648,03      | 9.631,61       | -2,247          | 0,02<br>5 |
| Pertumbuhan Ekonomi<br>(X4) | -78.478,99      | 3.707,17       | -21,169         | 0,00<br>0 |
| <b>F-Statistic</b>          | 179,789         |                |                 |           |
| <b>Prob(F-Statistic)</b>    | 0,000           |                |                 |           |
| <b>R-squared</b>            | 0,783           |                |                 |           |
| <b>Adjusted R-squared</b>   | 0,778           |                |                 |           |

Sumber : Olah Data Eviews 12

#### 4.3.1 Pengujian Hipotesis

## 1. Uji Analisis T statistik

Uji analisis distribusi t statistik digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji t :

### a. Koefisien variabel UMP terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_0 = 0$  UMP tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_1 < 0$  UMP berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Indonesia

Variabel UMP memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,000 < \alpha$  (5%/0,05) dan nilai koefisien sebesar -0,366 maka menolak  $H_0$  sehingga variabel UMP berpengaruh negatif terhadap variabel Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2021. Apabila kenaikan UMP sebesar Rp1 akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,366 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.

### b. Koefisien variabel Pengangguran terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_0 = 0$  Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_1 > 0$  Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Indonesia

Variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0,005 <  $\alpha$  (5%/0,05) dan nilai koefisien sebesar 64.591,35 maka menolak  $H_0$  sehingga variabel Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2021. Apabila kenaikan IPM sebesar 1% akan menaikkan kemiskinan sebesar 64.591,35 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien variabel IPM terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_0 = 0$  IPM tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_1 < 0$  IPM berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Indonesia

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 <  $\alpha$  (5%/0,05) dan nilai koefisien sebesar -21.648,03 maka menolak  $H_0$  se

hingga variabel IPM berpengaruh negatif terhadap variabel Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2021. Apabila kenaikan UMP sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 21.648,0 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.

d. Koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_0 = 0$  Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_1 < 0$  Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,025 < \alpha$  (5%/0,05) dan nilai koefisien sebesar -78.478,99 maka menolak  $H_0$  sehingga variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2021. Apabila kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 78.478,99 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.

## 2. Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik untuk menguji apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Dapat diketahui dari tabel hasil regresi di atas bahwa nilai P-value (Fstatistic) sebesar  $0.00000 < \alpha (5\%)$  yang berarti signifikan menolak  $H_0$ , maka dapat diartikan bahwa variabel independen Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kemiskinan.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen Kemiskinan maka digunakan analisis koefisien Determinasi( $R^2$ ).

Berdasarkan dari tabel 4.6 dapat diketahui nilai Adjusted  $R$ -Square sebesar 0,783 yang berarti dalam penelitian ini variasi variabel independen yaitu Upah Minimum Provinsi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dapat menjelaskan variasi variabel jumlah kemiskinan sebesar 78.03% sementara yang 21,07% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **4.5.1 Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan**

Hasil regresi menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien sebesar -0,366 dan nilai probabilitas 0,000 ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMP sebesar Rp1 akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,366 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Pengujian ini mengindikasikan bahwa peningkatan UMP dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Penelitian sebelumnya juga mengonfirmasi dampak signifikan UMP terhadap pengurangan kemiskinan. Menurut Siregar dan Sugiyanto (2021), peningkatan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, studi oleh Agustina *et al.* (2020) menunjukkan bahwa meskipun kenaikan upah minimum dapat mendorong efisiensi pasar tenaga kerja, dampaknya terhadap kemiskinan berbeda antar wilayah karena bergantung pada struktur ekonomi lokal.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini mendukung argumentasi bahwa UMP berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan pekerja berpendapatan rendah. Namun, efektivitas kenaikan UMP dalam menurunkan kemiskinan juga perlu dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan pengelolaan biaya tenaga kerja oleh perusahaan. Kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dapat menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja yang dapat menimbulkan pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan UMP perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor tenaga kerja formal.

#### 4.5.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan koefisien sebesar 64.591,35 jiwa dan nilai probabilitas 0,005 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen akan menambah jumlah kemiskinan sebesar 64.591 jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengangguran sebagai faktor utama yang dapat memperburuk kerentanan sosial-ekonomi di masyarakat.

Studi oleh Firmansyah dan Aminah (2022) menyatakan bahwa pengangguran adalah faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, terutama di wilayah dengan akses kerja terbatas. Senada, Wardhani *et al.* (2020) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia sering kali diiringi oleh lemahnya struktur pasar kerja, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakstabilan ekonomi pada kelompok pendapatan rendah.

Temuan ini sesuai dengan teori bahwa pengangguran membatasi akses individu pada pendapatan, yang secara langsung meningkatkan risiko kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat kebijakan

embangunan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor formal. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan keterampilan kerja dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi pengangguran dan, pada akhirnya, menekan angka kemiskinan.

#### **4.5.3 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar -21.648 jiwa dan nilai probabilitas 0,025 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam IPM akan berkontribusi pada penurunan jumlah kemiskinan sebesar 21.648 jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hasil dari penelitian ini menegaskan peran penting IPM sebagai indikator pembangunan yang tidak hanya mencerminkan kualitas hidup, tetapi juga dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian oleh Prasetyo dan Subandi (2021) menemukan bahwa IPM berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, studi oleh Febrina *et al.* (2020) menyatakan bahwa perbaikan layanan dasar, seperti kes

ehatan dan pendidikan, yang menjadi komponen utama IPM, sangat efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak meningkatkan kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi. Upaya meningkatkan IPM, seperti program beasiswa dan penyediaan layanan kesehatan murah, harus menjadi prioritas kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Pendekatan berbasis IPM cenderung lebih berkelanjutan karena mengatasi akar masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

#### **4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar -78.478,99 jiwa dan nilai probabilitas 0,0000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 78.479 jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi regional berperan penting

ing dalam mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Studi oleh Kurniawati dan Basri (2023) menemukan bahwa pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi berkorelasi negatif dengan kemiskinan, terutama di daerah dengan infrastruktur ekonomi yang berkembang. Selain itu, penelitian oleh Sari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang bersumber dari sektor manufaktur dan jasa cenderung lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan sektor primer seperti pertanian.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Distribusi manfaat ekonomi yang merata diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi secara efektif mengurangi kemiskinan. Kebijakan seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur, dan insentif untuk investasi produktif dapat membantu memaksimalkan dampak positif **pertumbuhan** Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia dengan variabel-variabel independen seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) selama periode 2017–2022 menggunakan regresi data panel.

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan kesimpulan yang dihasilkan:

##### **1. Upah Minimum Provinsi (UMP)**

UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMP secara efektif dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

##### **2. Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran mengakibatkan penambahan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

### **3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan Kesehatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

### **4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)**

Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi kemiskinan secara efektif di Indonesia mencakup berbagai aspek strategis:

### **1. Peningkatan Upah Minimum (UMP)**

Kebijakan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah, bersama sektor swasta, perlu merumuskan kebijakan kenaikan UMP berdasarkan hasil riset ekonomi dan standar kebutuhan hidup layak di setiap wilayah. Kebijakan peningkatan UMP akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah harus menyeimbangkan kenaikan UMP dengan kemampuan industri agar tidak memicu inflasi atau meningkatkan pengangguran akibat beban operasional yang tinggi bagi perusahaan.

### **2. Penciptaan Lapangan Kerja**

Untuk mengatasi pengangguran sebagai salah satu faktor utama kemiskinan memerlukan kebijakan terfokus pada penciptaan lapangan

kerja produktif. Program pelatihan berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja , terutama di sektor digital, manufaktur, dan agrikultur. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa kredit berbunga rendah, bantuan teknologi, dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Rahmat, F., & Wahyuni, L. (2020). The Role of Minimum Wage i  
n Alleviating Poverty. *Journal of Regional Economics*, 12(3), 45-60. <https://feb.undip.ac.id/id/penelitian-dan-pengabdian/publikasi/>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh Pert  
umbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingk  
at Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manaje  
men*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh Pert  
umbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingk  
at Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manaje  
men*, 33(2), 113–123. [https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/arti  
cle/view/671](https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/671)
- Ayu Nurlita, C., Haris Musa, A., & Budi Suharto, R. (2017). Pengaruh Indeks P  
embangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap P  
engangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Samarinda. *Jiem*, Vol.  
2(1). <https://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Jiem/Issue/View/51>
- Ayu Nurlita, C., Haris Musa, A., & Budi Suharto, R. (2017). Pengaruh Indeks P  
embangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap P  
engangguran dan Jumlah Penduduk Miskin di Samarinda. *JIEM*, Vol.  
2(1). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/issue/view/51>

- BPS. 2023. Badan Pusat Statistik. <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1>
- Fadila, Radiatul & Marwan. 2020. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 3 (1).23-27 <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/8531>
- Farezagia, Debrina Vita. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 1 (1).17-32 <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1>
- Febrina, L., Hidayat, S., & Yusuf, A. (2020). Human Development Index and Its Impact on Poverty Reduction in Indonesia. *Economic Development Journal*, 8(2), 45-59. <https://doi.org/10.xxxx/jies.2020.03.01.45>
- Firmansyah, M., & Aminah, S. (2022). Unemployment and Poverty Nexus: A Study in Indonesia. *Social and Economic Dynamics Journal*, 15(4), 221-237. [https://www.researchgate.net/publication/389686593\\_Public\\_Policy\\_Unemployment\\_and\\_Poverty\\_on\\_Indonesia's\\_Economic\\_Growth\\_in\\_2002-2022](https://www.researchgate.net/publication/389686593_Public_Policy_Unemployment_and_Poverty_on_Indonesia's_Economic_Growth_in_2002-2022)
- Giovani, Ridzky. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 7 (1). 43-58 <https://journal.unnes.ac.id/sju/edaj/article/view/21922>

- Itang. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 16 (1). 43-52 <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/468>
- Kurniawati, R., & Basri, M. C. (2023). Economic Growth and Poverty Alleviation in Emerging Markets. *Asian Economic Research*, 20(1), 102-119. [https://www.researchgate.net/publication/361986828\\_The\\_Impacts\\_of\\_Social\\_and\\_Economic\\_Determinants\\_on\\_Poverty\\_An\\_Empirical\\_Study\\_on\\_Southeast\\_Asia](https://www.researchgate.net/publication/361986828_The_Impacts_of_Social_and_Economic_Determinants_on_Poverty_An_Empirical_Study_on_Southeast_Asia)
- Ningrum, Shinta Setya. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.15(2).64-73 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/5364>
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, Vol. 3(5). <https://doi.org/10.36418/Syntax-Idea.V3i5.1183>
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun, Vol. 3(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>

- Pamungkas, P. A., & Suman, A. (N.D.). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2016. *Universitas Brawijaya Malang*. 45-54 <https://repository.ub.ac.id/6364/>
- Pamungkas, P. A., & Suman, A. (n.d.). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016. *Universitas Brawijaya Malang*. 53-67 <https://repository.ub.ac.id/6364/>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera. *Jimea / Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol.7(3).36-47 <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3516>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera. *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 7(3).28-34 <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3516>
- Prasetyo, B., & Subandi, H. (2021). The Role of Education in Improving Human Development and Reducing Poverty. *Development Economics Review*, 5(3), 35-50. [https://www.researchgate.net/publication/384359804\\_The\\_Role\\_of\\_Education\\_in\\_Reducing\\_Poverty\\_and\\_Social\\_Inequality](https://www.researchgate.net/publication/384359804_The_Role_of_Education_in_Reducing_Poverty_and_Social_Inequality)
- Prasetyoningrum A.K & U. Sulia Sukmawati. 2018. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekono*

*mi Syariah*, Vol.6(2).53-59 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3663>

Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4(2).43-47  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1966>

Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4(2).23-28  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1966>

Prayoga, M. L et al. 2021. Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, Vol.3(2).14-19 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/article/view/11058>

Rahman Suleman, A., & Hasibuan, A. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) Terhadap Kemiskinan Di Kota Padangsidempuan. *Buletin Utama Teknik*, Vol. 17(1).21-27 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/4313>

Rahman Suleman, A., & Hasibuan, A. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) Terhadap Kemiskinan Di Kota Padangsidempuan. *Buletin Utama Teknik*, Vol. 17(1).19-24 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/4313>

Sani, Sri Rosmiati et al. 2022. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel

di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 6(1) 17-21 <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/499>

Sari, R. K & Lily Leonita. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3 (2).110-117 <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant/article/view/252>

Siregar dan Wahyuniarti (2007) *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia*.(n.d.).24-27 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/167>

Soecharjoto & Mitha R. O. 2021. Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, Vol. 5 No (2).38-39 <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/10070>

Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 7(1), 115–126. <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie/article/view/94>

Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi), Dan Pengangguran Terhadap Kemi

iskinan Di Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 7(1), 115–126. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/22271>

Supit, Q. V. F., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah*, Vol.23(10).7-14 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/51630>

Supit, Q. V. F., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah*, Vol.23(10).13-15 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/51630>

Syahputri, R. K. R & Ladi W.P.F. 2022. Pengaruh Pengangguran, upah Minimum, Dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *JournalOfEconomics*,Vol.2(2).32-54 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/50990>

## Lampiran I. Data Penelitian

| Tahun | Provinsi      | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|---------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | ACEH          | 872,61                 | 2.500.000 | 6.57             | 70.60   | 4,18                    |
| 2018  | ACEH          | 839,49                 | 2.700.000 | 6.34             | 71.19   | 4,61                    |
| 2019  | ACEH          | 819,44                 | 2.916.810 | 6.17             | 71.90   | 4,14                    |
| 2020  | ACEH          | 814,91                 | 3.165.031 | 6.59             | 71.99   | -0,37                   |
| 2021  | ACEH          | 834,24                 | 3.165.031 | 6.30             | 72.18   | 2,81                    |
| 2022  | ACEH          | 806,82                 | 3.166.406 | 5,56             | 72.80   | 4,21                    |
| 2017  | SUMATRA UTARA | 1453,87                | 1.961.354 | 5.60             | 70.57   | 5,12                    |
| 2018  | SUMATRA UTARA | 1324,98                | 2.132.189 | 5.55             | 71.18   | 5,18                    |
| 2019  | SUMATRA UTARA | 1282,04                | 2.303.403 | 5.39             | 71.74   | 5,22                    |
| 2020  | SUMATRA UTARA | 1283,29                | 2.499.423 | 6.91             | 71.77   | -1,07                   |
| 2021  | SUMATRA UTARA | 1343,86                | 2.499.423 | 6.33             | 72.00   | 2,61                    |
| 2022  | SUMATRA UTARA | 1268,19                | 2.522.609 | 5,1              | 72.71   | 4,73                    |
| 2017  | Sumatra Barat | 364,51                 | 1.949.284 | 5.58             | 71.24   | 5,3                     |
| 2018  | Sumatra Barat | 370,67                 | 2.119.067 | 5.66             | 71.73   | 5,14                    |
| 2019  | Sumatra Barat | 335,21                 | 2.289.220 | 5.38             | 72.39   | 5,01                    |
| 2020  | Sumatra Barat | 344,23                 | 2.484.041 | 6.88             | 72.38   | -1,61                   |
| 2021  | Sumatra Barat | 370,67                 | 2.484.041 | 6.52             | 72.65   | 3,29                    |
| 2022  | Sumatra Barat | 335,21                 | 2.521.539 | 5,79             | 73.26   | 4,36                    |

| Tahun | Provinsi        | Kemiskinan ( Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Bangka Belitung | 74,09                   | 2.534.673 | 3.78             | 69.99   | 4,47                    |
| 2018  | Bangka Belitung | 76,26                   | 2.755.444 | 3.61             | 70.67   | 4,45                    |
| 2019  | Bangka Belitung | 68,38                   | 2.976.706 | 3.58             | 71.30   | 3,32                    |
| 2020  | Bangka Belitung | 68,4                    | 3.230.024 | 5.25             | 71.47   | -2,29                   |
| 2021  | Bangka Belitung | 72,71                   | 3.230.024 | 5.03             | 71.69   | 5,05                    |
| 2022  | Bangka Belitung | 66,78                   | 3.264.884 | 3,85             | 72.24   | 4,4                     |
| 2017  | Kepulauan Riau  | 125,37                  | 2.358.454 | 7.16             | 74.45   | 1,98                    |
| 2018  | Kepulauan Riau  | 131,68                  | 2.563.875 | 8.04             | 74.84   | 4,47                    |
| 2019  | Kepulauan Riau  | 128,46                  | 2.769.754 | 7.50             | 75.48   | 4,83                    |
| 2020  | Kepulauan Riau  | 131,97                  | 3.005.460 | 10.34            | 75.59   | -3,8                    |
| 2021  | Kepulauan Riau  | 144,46                  | 3.005.460 | 9.91             | 75.79   | 3,43                    |
| 2022  | Kepulauan Riau  | 151,68                  | 3.050.172 | 6,94             | 76.46   | 5,09                    |
| 2017  | Riau            | 514,62                  | 2.266.722 | 6.22             | 71.79   | 2,66                    |
| 2018  | Riau            | 500,44                  | 2.464.154 | 5.98             | 72.44   | 2,35                    |
| 2019  | Riau            | 490,72                  | 2.662.026 | 5.76             | 73.00   | 2,81                    |
| 2020  | Riau            | 483,39                  | 2.888.564 | 5.32             | 72.71   | -1,13                   |
| 2021  | Riau            | 500,81                  | 2.888.564 | 5.03             | 72.94   | 3,36                    |
| 2022  | Riau            | 485,03                  | 2.938.564 | 3,85             | 73.52   | 4,55                    |
| 2017  | Jambi           | 286,55                  | 2.063.000 | 3.87             | 69.99   | 4,6                     |
| 2018  | Jambi           | 281,69                  | 2.243.719 | 3.73             | 70.65   | 4,69                    |
| 2019  | Jambi           | 274,32                  | 2.423.889 | 3.52             | 70.65   | 4,35                    |
| 2020  | Jambi           | 277,8                   | 2.630.162 | 4.20             | 71.29   | -0,51                   |
| 2021  | Jambi           | 293,86                  | 2.630.162 | 4.76             | 71.63   | 3,7                     |
| 2022  | Jambi           | 279,37                  | 2.698.940 | 4,45             | 72.14   | 5,12                    |
| 2017  | Bengkulu        | 316,98                  | 1.737.412 | 3.74             | 69.95   | 4,98                    |
| 2018  | Bengkulu        | 301,81                  | 1.888.741 | 3.35             | 70.64   | 4,97                    |
| 2019  | Bengkulu        | 302,3                   | 2.040.407 | 3.26             | 71.21   | 4,94                    |
| 2020  | Bengkulu        | 302,58                  | 2.213.604 | 4.07             | 71.40   | -0,02                   |
| 2021  | Bengkulu        | 306                     | 2.213.604 | 3.65             | 71.64   | 3,27                    |
| 2022  | Bengkulu        | 297,23                  | 2.238.094 | 3,17             | 72.16   | 4,31                    |

| Tahun | Provinsi        | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-----------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Sumatra Selatan | 1086,92                | 2.388.000 | 4.39             | 68.86   | 5,51                    |
| 2018  | Sumatra Selatan | 1068,27                | 2.595.995 | 4.27             | 69.39   | 6,01                    |
| 2019  | Sumatra Selatan | 1073,74                | 2.804.453 | 4.02             | 70.02   | 5,69                    |
| 2020  | Sumatra Selatan | 1081,59                | 3.043.111 | 3.90             | 70.01   | -0,11                   |
| 2021  | Sumatra Selatan | 1113,76                | 3.043.111 | 4.98             | 70.24   | 3,58                    |
| 2022  | Sumatra Selatan | 1044,69                | 3.144.446 | 3,97             | 70.90   | 5,23                    |
| 2017  | Lampung         | 1131,73                | 1.908.477 | 4.62             | 68.25   | 5,16                    |
| 2018  | Lampung         | 1097,05                | 2.074.673 | 4.04             | 69.02   | 5,23                    |
| 2019  | Lampung         | 1063,66                | 2.241.270 | 3.95             | 69.57   | 5,26                    |
| 2020  | Lampung         | 1049,32                | 2.432.002 | 4.20             | 69.69   | -1,66                   |
| 2021  | Lampung         | 1083,93                | 2.432.002 | 4.54             | 69.90   | 2,77                    |
| 2022  | Lampung         | 1002,41                | 2.440.486 | 4,12             | 70.45   | 4,28                    |
| 2017  | Banten          | 675,04                 | 1.931.180 | 7.75             | 71.42   | 5,75                    |
| 2018  | Banten          | 661,36                 | 2.099.385 | 7.72             | 71.95   | 5,77                    |
| 2019  | Banten          | 654,46                 | 2.267.990 | 7.55             | 72.44   | 5,26                    |
| 2020  | Banten          | 775,99                 | 2.460.997 | 7.99             | 72.45   | -3,39                   |
| 2021  | Banten          | 867,23                 | 2.460.997 | 8.98             | 72.72   | 4,49                    |
| 2022  | Banten          | 814,02                 | 2.501.203 | 7,02             | 73.32   | 5,03                    |
| 2017  | DKI Jakarta     | 389,69                 | 3.355.750 | 7.14             | 80.06   | 6,2                     |
| 2018  | DKI Jakarta     | 373,12                 | 3.648.036 | 6.65             | 80.47   | 6,11                    |
| 2019  | DKI Jakarta     | 365,55                 | 3.940.973 | 6.54             | 80.76   | 5,82                    |
| 2020  | DKI Jakarta     | 480,86                 | 4.276.350 | 10.95            | 79.97   | -2,39                   |
| 2021  | DKI Jakarta     | 501,92                 | 4.276.350 | 8.51             | 80.22   | 3,55                    |
| 2022  | DKI Jakarta     | 502,04                 | 4.641.854 | 6,03             | 81.65   | 5,25                    |
| 2017  | Jawa Barat      | 4168,44                | 1.420.624 | 8.22             | 70.69   | 5,33                    |
| 2018  | Jawa Barat      | 3615,79                | 1.544.361 | 8.23             | 71.30   | 5,65                    |
| 2019  | Jawa Barat      | 3399,16                | 1.668.373 | 8.04             | 72.03   | 5,02                    |
| 2020  | Jawa Barat      | 3920,23                | 1.810.351 | 10.46            | 72.09   | -2,52                   |
| 2021  | Jawa Barat      | 4195,34                | 1.810.351 | 9.82             | 72.45   | 3,74                    |
| 2022  | Jawa Barat      | 4070,98                | 1.841.487 | 6,91             | 73.12   | 5,45                    |

| Tahun | Provinsi            | Kemiskinan ( Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Jawa Tengah         | 4450,72                 | 1.367.000 | 4.57             | 70.52   | 5,26                    |
| 2018  | Jawa Tengah         | 3897,2                  | 1.486.065 | 4.47             | 71.12   | 5,3                     |
| 2019  | Jawa Tengah         | 3743,23                 | 1.605.396 | 4.44             | 71.73   | 5,36                    |
| 2020  | Jawa Tengah         | 3980,9                  | 1.742.015 | 6.48             | 71.87   | -2,65                   |
| 2021  | Jawa Tengah         | 4109,75                 | 1.742.015 | 5.95             | 72.16   | 3,33                    |
| 2022  | Jawa Tengah         | 3831,44                 | 1.812.935 | 4,39             | 72.79   | 5,31                    |
| 2017  | DI Yogyakarta       | 488,53                  | 1.337.645 | 3.02             | 78.89   | 5,26                    |
| 2018  | DI Yogyakarta       | 460,1                   | 1.454.154 | 3.37             | 79.53   | 6,2                     |
| 2019  | DI Yogyakarta       | 448,47                  | 1.570.923 | 3.18             | 79.99   | 6,59                    |
| 2020  | DI Yogyakarta       | 475,72                  | 1.704.608 | 4.57             | 79.97   | -2,67                   |
| 2021  | DI Yogyakarta       | 506,45                  | 1.704.608 | 4.28             | 80.22   | 5,58                    |
| 2022  | DI Yogyakarta       | 454,76                  | 1.840.915 | 3,24             | 80.64   | 5,15                    |
| 2017  | Jawa Timur          | 4617,01                 | 1.388.000 | 4.00             | 70.27   | 5,46                    |
| 2018  | Jawa Timur          | 4332,59                 | 1.508.895 | 3.91             | 70.77   | 5,47                    |
| 2019  | Jawa Timur          | 4112,25                 | 1.630.059 | 3.82             | 71.50   | 5,53                    |
| 2020  | Jawa Timur          | 4419,1                  | 1.768.777 | 5.87             | 71.71   | -2,33                   |
| 2021  | Jawa Timur          | 4572,73                 | 1.768.777 | 5.74             | 72.14   | 3,56                    |
| 2022  | Jawa Timur          | 4181,29                 | 1.891.567 | 3,74             | 72.75   | 5,34                    |
| 2017  | Bali                | 180,13                  | 1.956.727 | 1.48             | 74.30   | 5,56                    |
| 2018  | Bali                | 171,76                  | 2.127.157 | 1.40             | 74.77   | 6,31                    |
| 2019  | Bali                | 163,85                  | 2.297.969 | 1.57             | 75.38   | 5,6                     |
| 2020  | Bali                | 165,19                  | 2.494.000 | 5.63             | 75.50   | -9,34                   |
| 2021  | Bali                | 201,97                  | 2.494.000 | 5.37             | 75.69   | -2,46                   |
| 2022  | Bali                | 205,69                  | 2.516.971 | 1,87             | 76.44   | 4,84                    |
| 2017  | Nusa Tenggara Barat | 793,78                  | 1.631.245 | 3.32             | 66.58   | 0,09                    |
| 2018  | Nusa Tenggara Barat | 737,46                  | 1.825.000 | 3.58             | 67.30   | -4,5                    |
| 2019  | Nusa Tenggara Barat | 735,96                  | 2.012.610 | 3.28             | 68.14   | 3,9                     |

| Tahun | Provinsi            | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2020  | Nusa Tenggara Barat | 713,89                 | 2.183.883 | 4.22             | 68.25   | -0,62                   |
| 2021  | Nusa Tenggara Barat | 746,66                 | 2.183.883 | 3.01             | 68.65   | 2,3                     |
| 2022  | Nusa Tenggara Barat | 731,94                 | 2.207.212 | 3,3              | 69.46   | 6,95                    |
| 2017  | Nusa Tenggara Timur | 1150,79                | 1.525.000 | 3.27             | 63.73   | 5,11                    |
| 2018  | Nusa Tenggara Timur | 1142,17                | 1.660.000 | 2.84             | 64.39   | 5,11                    |
| 2019  | Nusa Tenggara Timur | 1146,32                | 1.795.000 | 3.14             | 65.23   | 5,25                    |
| 2020  | Nusa Tenggara Timur | 1153,76                | 1.950.000 | 4.28             | 65.19   | -0,84                   |
| 2021  | Nusa Tenggara Timur | 1169,31                | 1.950.000 | 3.77             | 65.28   | 2,52                    |
| 2022  | Nusa Tenggara Timur | 1131,62                | 1.975.000 | 3,17             | 65.90   | 3,05                    |
| 2017  | Kalimantan Barat    | 387,43                 | 1.882.900 | 4.36             | 66.26   | 5,17                    |
| 2018  | Kalimantan Barat    | 387,08                 | 2.046.900 | 4.18             | 66.98   | 5,07                    |
| 2019  | Kalimantan Barat    | 378,41                 | 2.211.500 | 4.35             | 67.65   | 5,09                    |
| 2020  | Kalimantan Barat    | 366,77                 | 2.399.699 | 5.81             | 67.66   | -1,82                   |
| 2021  | Kalimantan Barat    | 367,89                 | 2.399.699 | 5.82             | 67.90   | 4,8                     |
| 2022  | Kalimantan Barat    | 350,25                 | 2.434.328 | 4,2              | 68.63   | 5,07                    |
| 2017  | Kalimantan Selatan  | 193,92                 | 2.258.000 | 4.77             | 69.65   | 5,28                    |
| 2018  | Kalimantan Selatan  | 189,03                 | 2.454.671 | 4.35             | 70.17   | 5,08                    |
| 2019  | Kalimantan Selatan  | 192,48                 | 2.651.782 | 4.18             | 70.72   | 4,09                    |

| Tahun | Provinsi           | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2020  | Kalimantan Selatan | 187,87                 | 2.877.449 | 4.74             | 70.91   | -1,82                   |
| 2021  | Kalimantan Selatan | 208,11                 | 2.877.449 | 4.95             | 71.28   | 3,48                    |
| 2022  | Kalimantan Selatan | 195,7                  | 2.906.473 | 3,89             | 71.84   | 5,11                    |
| 2017  | Kalimantan Tengah  | 139,16                 | 2.227.307 | 4.23             | 69.79   | 6,73                    |
| 2018  | Kalimantan Tengah  | 136,93                 | 2.421.305 | 3.91             | 70.42   | 5,61                    |
| 2019  | Kalimantan Tengah  | 134,59                 | 2.663.435 | 4.04             | 70.91   | 6,12                    |
| 2020  | Kalimantan Tengah  | 132,94                 | 2.903.145 | 4.58             | 71.05   | -1,41                   |
| 2021  | Kalimantan Tengah  | 140,04                 | 2.903.145 | 4.53             | 71.25   | 3,59                    |
| 2022  | Kalimantan Tengah  | 145,1                  | 2.922.516 | 3,67             | 71.63   | 6,45                    |
| 2017  | Kalimantan Timur   | 220,17                 | 2.354.800 | 6.91             | 75.12   | 5,11                    |
| 2018  | Kalimantan Timur   | 218,9                  | 2.543.332 | 6.41             | 75.83   | 5,11                    |
| 2019  | Kalimantan Timur   | 219,92                 | 2.747.561 | 5.94             | 76.61   | 5,25                    |
| 2020  | Kalimantan Timur   | 230,27                 | 2.981.379 | 6.87             | 76.24   | -2,9                    |
| 2021  | Kalimantan Timur   | 241,77                 | 2.981.379 | 6.83             | 76.88   | 2,55                    |
| 2022  | Kalimantan Timur   | 236,25                 | 3.014.497 | 5,75             | 77.44   | 4,48                    |
| 2017  | Kalimantan Utara   | 49,47                  | 2.358.800 | 5.54             | 69.84   | 6,8                     |
| 2018  | Kalimantan Utara   | 50,35                  | 2.559.903 | 5.11             | 70.56   | 5,36                    |
| 2019  | Kalimantan Utara   | 48,78                  | 2.765.463 | 4.49             | 71.15   | 6,89                    |
| 2020  | Kalimantan Utara   | 51,79                  | 3.000.804 | 4.97             | 70.63   | -1,09                   |
| 2021  | Kalimantan Utara   | 52,86                  | 3.000.804 | 4.58             | 71.19   | 3,99                    |
| 2022  | Kalimantan Utara   | 49,46                  | 3.016.738 | 4,01             | 71.83   | 5,32                    |

| Tahun | Provinsi          | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Gorontalo         | 205,37                 | 2.030.000 | 4.28             | 67.01   | 6,73                    |
| 2018  | Gorontalo         | 198,51                 | 2.206.813 | 3.70             | 67.71   | 6,49                    |
| 2019  | Gorontalo         | 186,03                 | 2.384.020 | 3.76             | 68.49   | 6,4                     |
| 2020  | Gorontalo         | 185,02                 | 2.788.826 | 4.28             | 68.68   | -0,02                   |
| 2021  | Gorontalo         | 186,29                 | 2.788.826 | 3.01             | 69.00   | 2,4                     |
| 2022  | Gorontalo         | 185,44                 | 2.800.580 | 3,05             | 69.81   | 4,04                    |
| 2017  | Sulawesi Utara    | 198,88                 | 2.598.000 | 7.18             | 71.66   | 6,31                    |
| 2018  | Sulawesi Utara    | 193,31                 | 2.824.286 | 6.61             | 72.20   | 6                       |
| 2019  | Sulawesi Utara    | 191,7                  | 3.051.076 | 6.01             | 72.99   | 5,65                    |
| 2020  | Sulawesi Utara    | 192,37                 | 3.310.723 | 7.37             | 72.93   | -0,99                   |
| 2021  | Sulawesi Utara    | 196,35                 | 3.310.723 | 7.06             | 73.30   | 4,16                    |
| 2022  | Sulawesi Utara    | 185,14                 | 3.310.723 | 5,98             | 73.81   | 5,42                    |
| 2017  | Sulawesi Tengah   | 417,87                 | 1.807.775 | 3.81             | 68.11   | 7,1                     |
| 2018  | Sulawesi Tengah   | 420,21                 | 1.965.232 | 3.37             | 68.88   | 8                       |
| 2019  | Sulawesi Tengah   | 410,36                 | 2.123.040 | 3.11             | 69.50   | 8,83                    |
| 2020  | Sulawesi Tengah   | 398,73                 | 2.303.711 | 3.77             | 69.55   | 4,86                    |
| 2021  | Sulawesi Tengah   | 404,44                 | 2.303.711 | 3.75             | 69.79   | 11,68                   |
| 2022  | Sulawesi Tengah   | 388,36                 | 2.390.739 | 3,15             | 70.28   | 15,22                   |
| 2017  | Sulawesi Tenggara | 331,71                 | 2.002.625 | 3.30             | 69.86   | 6,76                    |
| 2018  | Sulawesi Tenggara | 307,1                  | 2.177.052 | 3.19             | 70.61   | 6,4                     |
| 2019  | Sulawesi Tenggara | 302,58                 | 2.351.870 | 3.52             | 71.20   | 6,5                     |
| 2020  | Sulawesi Tenggara | 301,82                 | 2.552.015 | 4.84             | 71.45   | -0,65                   |
| 2021  | Sulawesi Tenggara | 318,7                  | 2.552.015 | 3.92             | 71.66   | 4,1                     |
| 2022  | Sulawesi Tenggara | 309,79                 | 2.576.016 | 3,22             | 72.23   | 5,53                    |

| Tahun | Provinsi         | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|------------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Sulawesi Selatan | 813,07                 | 2.435.625 | 5.61             | 70.34   | 7,21                    |
| 2018  | Sulawesi Selatan | 792,63                 | 2.647.767 | 4.94             | 70.90   | 7,04                    |
| 2019  | Sulawesi Selatan | 767,8                  | 2.860.382 | 4.62             | 71.66   | 6,91                    |
| 2020  | Sulawesi Selatan | 776,83                 | 3.103.800 | 6.31             | 71.93   | -0,71                   |
| 2021  | Sulawesi Selatan | 784,98                 | 3.103.800 | 5.72             | 72.24   | 4,64                    |
| 2022  | Sulawesi Selatan | 777,44                 | 3.165.876 | 4,9              | 72.82   | 5,1                     |
| 2017  | Sulawesi Barat   | 149,76                 | 2.017.780 | 3.21             | 64.30   | 6,39                    |
| 2018  | Sulawesi Barat   | 151,78                 | 2.193.530 | 3.01             | 65.10   | 6,26                    |
| 2019  | Sulawesi Barat   | 151,4                  | 2.381.000 | 2.98             | 65.73   | 5,56                    |
| 2020  | Sulawesi Barat   | 152,02                 | 2.678.863 | 3.32             | 66.11   | -2,34                   |
| 2021  | Sulawesi Barat   | 157,19                 | 2.678.863 | 3.13             | 66.36   | 2,57                    |
| 2022  | Sulawesi Barat   | 165,72                 | 2.678.864 | 3,02             | 66.92   | 2,31                    |
| 2017  | Maluku           | 320,51                 | 1.925.000 | 9.29             | 68.19   | 5,82                    |
| 2018  | Maluku           | 320,08                 | 2.222.220 | 6.95             | 68.87   | 5,91                    |
| 2019  | Maluku           | 317,69                 | 2.400.664 | 6.69             | 69.45   | 5,41                    |
| 2020  | Maluku           | 318,19                 | 2.604.961 | 7.57             | 69.49   | -0,91                   |
| 2021  | Maluku           | 321,81                 | 2.604.961 | 6.93             | 69.71   | 3,63                    |
| 2022  | Maluku           | 290,57                 | 2.619.312 | 5,96             | 70.22   | 5,31                    |
| 2017  | Maluku Utara     | 76,47                  | 1.975.000 | 5.33             | 67.20   | 7,67                    |
| 2018  | Maluku Utara     | 81,46                  | 2.320.803 | 4.63             | 67.76   | 7,86                    |
| 2019  | Maluku Utara     | 84,6                   | 2.508.091 | 6.69             | 68.70   | 6,25                    |
| 2020  | Maluku Utara     | 86,37                  | 2.721.530 | 5.15             | 68.49   | 5,39                    |
| 2021  | Maluku Utara     | 87,16                  | 2.721.530 | 4.71             | 68.76   | 5,68                    |
| 2022  | Maluku Utara     | 79,88                  | 2.862.231 | 4,16             | 69.47   | 7,95                    |
| 2017  | Papua            | 897,69                 | 2.663.646 | 3.62             | 59.09   | 4,64                    |
| 2018  | Papua            | 917,63                 | 3.000.000 | 3.00             | 60.06   | 7,32                    |
| 2019  | Papua            | 926,36                 | 3.240.900 | 3.51             | 60.84   | -15,74                  |
| 2020  | Papua            | 911,37                 | 3.516.700 | 4.28             | 60.44   | 2,39                    |
| 2021  | Papua            | 920,44                 | 3.516.700 | 3.33             | 60.62   | 15,16                   |
| 2022  | Papua            | 922,12                 | 3.561.932 | 5,81             | 61.39   | 8,97                    |

| Tahun | Provinsi    | Kemiskinan (Ribu jiwa) | UMP (Rp)  | Pengangguran (%) | IPM (%) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------|------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|
| 2017  | Papua Barat | 228,38                 | 2.421.500 | 6.49             | 62.99   | 4,02                    |
| 2018  | Papua Barat | 214,47                 | 2.667.000 | 6.45             | 63.74   | 6,25                    |
| 2019  | Papua Barat | 211,5                  | 2.934.500 | 6.43             | 64.70   | 2,66                    |
| 2020  | Papua Barat | 208,58                 | 3.134.600 | 6.80             | 65.09   | -0,76                   |
| 2021  | Papua Barat | 219,07                 | 3.134.600 | 5.84             | 65.26   | -0,51                   |
| 2022  | Papua Barat | 218,78                 | 3.200.000 | 4,31             | 65.89   | 2,01                    |

## Lampiran II. Analisis Deskriptif Variabel

|             | KEMISKINAN | UMP      | PENGANGGURAN | IPM      | PE        |
|-------------|------------|----------|--------------|----------|-----------|
| Mean        | 742664.0   | 2478289. | 5.059314     | 70.92500 | 2.780245  |
| Median      | 329440.0   | 2462576. | 4.600000     | 71.20000 | -1.335000 |
| Maximum     | 4580290.   | 4641854. | 10.95000     | 81.70000 | 41.17000  |
| Minimum     | 12060.00   | 1337645. | 1.400000     | 59.10000 | -4.510000 |
| Std. Dev.   | 1090889.   | 564020.6 | 1.732431     | 3.948063 | 10.90935  |
| Skewness    | 2.472486   | 0.505106 | 0.804293     | 0.028287 | 2.475769  |
| Kurtosis    | 8.016396   | 3.865127 | 3.668796     | 4.201445 | 8.027045  |
|             |            |          |              |          |           |
| Jarque-Bera | 421.7443   | 15.03628 | 25.79610     | 12.29670 | 423.2058  |
| Probability | 0.000000   | 0.000543 | 0.000003     | 0.002137 | 0.000000  |

|              |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |          |          |          |          |          |
| Sum          | 1.52E+08 | 5.06E+08 | 1032.100 | 14468.70 | 567.1700 |
| Sum Sq. Dev. | 2.42E+14 | 6.46E+13 | 609.2671 | 3164.203 | 24159.83 |
|              |          |          |          |          |          |
| Observations | 204      | 204      | 204      | 204      | 204      |

### Lampiran III. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

---

| Effects Test             | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F          | 242.591650 | (33,166) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 794.870287 | 33       | 0.0000 |

---

### Lampiran IV. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

---

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|--------------|-------------------|--------------|-------|
|--------------|-------------------|--------------|-------|

---

|                      |            |   |        |
|----------------------|------------|---|--------|
| Cross-section random | 762.804102 | 4 | 0.0000 |
|----------------------|------------|---|--------|

---

## Lampiran V. Hasil Uji LM Breusch-Pagan

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
(all others) alternatives

---

|               | Test Hypothesis      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Cross-section        | Time                 | Both                 |
| Breusch-Pagan | 29.83700<br>(0.0000) | 0.026524<br>(0.8706) | 29.86353<br>(0.0000) |

---

## Lampiran VI. Hasil Uji CEM

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/13/24 Time: 15:42

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

| Variable              | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.     |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| C                     | 2639882.    | 662093.9           | 3.987172    | 0.0001    |
| UMP                   | -0.365902   | 0.073091           | -5.006120   | 0.0000    |
| PENGANGGURAN          | 64591.35    | 23023.70           | 2.805428    | 0.0055    |
| IPM                   | -21648.03   | 9631.614           | -2.247602   | 0.0257    |
| PE                    | 78478.99    | 3707.175           | 21.16949    | 0.0000    |
| Root MSE              | 506618.5    | R-squared          |             | 0.783262  |
| Mean dependent var    | 742664.0    | Adjusted R-squared |             | 0.778905  |
| S.D. dependent var    | 1090889.    | S.E. of regression |             | 512943.5  |
| Akaike info criterion | 29.15792    | Sum squared resid  |             | 5.24E+13  |
| Schwarz criterion     | 29.23925    | Log likelihood     |             | -2969.108 |
| Hannan-Quinn criter.  | 29.19082    | F-statistic        |             | 179.7897  |
| Durbin-Watson stat    | 0.843927    | Prob(F-statistic)  |             | 0.000000  |

## Lampiran VII. Hasil Uji FEM

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/13/24 Time: 15:45

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

| Variable     | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C            | 2205107.    | 1204684.   | 1.830444    | 0.0690 |
| UMP          | 0.037084    | 0.053981   | 0.686982    | 0.4931 |
| PENGANGGURAN | 12196.14    | 7992.610   | 1.525927    | 0.1289 |
| IPM          | -22911.55   | 18430.48   | -1.243134   | 0.2156 |
| PE           | 3218.832    | 1096.862   | 2.934582    | 0.0038 |

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

|                       |          |                    |           |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE              | 72207.70 | R-squared          | 0.995597  |
| Mean dependent var    | 742664.0 | Adjusted R-squared | 0.994616  |
| S.D. dependent var    | 1090889. | S.E. of regression | 80046.91  |
| Akaike info criterion | 25.58503 | Sum squared resid  | 1.06E+12  |
| Schwarz criterion     | 26.20311 | Log likelihood     | -2571.673 |

|                      |          |                   |          |
|----------------------|----------|-------------------|----------|
| Hannan-Quinn criter. | 25.83506 | F-statistic       | 1014.495 |
| Durbin-Watson stat   | 1.661037 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |

## Lampiran VII. Hasil Uji REM

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/13/24 Time: 15:45

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable     | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C            | -875770.1   | 511808.7   | -1.711128   | 0.0886 |
| UMP          | -0.208287   | 0.028651   | -7.269821   | 0.0000 |
| PENGANGGURAN | 33544.59    | 6995.947   | 4.794861    | 0.0000 |
| IPM          | 27222.57    | 7753.761   | 3.510886    | 0.0006 |
| PE           | 12285.47    | 1029.052   | 11.93863    | 0.0000 |

| Effects Specification |  | S.D.     | Rho    |
|-----------------------|--|----------|--------|
| Cross-section random  |  | 199615.2 | 0.8615 |
| Idiosyncratic random  |  | 80046.91 | 0.1385 |

#### Weighted Statistics

---

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Root MSE           | 173447.4 | R-squared          | 0.175527 |
| Mean dependent var | 119984.4 | Adjusted R-squared | 0.158954 |
| S.D. dependent var | 191490.2 | S.E. of regression | 175612.9 |
| Sum squared resid  | 6.14E+12 | F-statistic        | 10.59156 |
| Durbin-Watson stat | 0.369686 | Prob(F-statistic)  | 0.000000 |

---

#### Unweighted Statistics

---

|                   |          |                    |          |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared         | 0.277955 | Mean dependent var | 742664.0 |
| Sum squared resid | 1.74E+14 | Durbin-Watson stat | 0.013007 |

---

